



Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbinu

08
POVERTY GROWTH

Rancangan Rencana Strategis KKP Tahun 2025–2029

Ruang Lingkup
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Agustus 2025

04

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

SASARAN STRATEGIS

PROSES BISNIS

ISU DAN STRATEGI

- ▶ Isu Strategis Pencegahan
Strategi Pencegahan
- ▶ Isu Strategis Pengawasan
Strategi Pengawasan
- ▶ Isu Strategis Penegakan Hukum
Strategi Penegakan Hukum

KEBUTUHAN ANGGARAN

ACTIVITY PLAN

Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)



Dukungan PSDKP 2025-2029

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KKP (Versi 1)

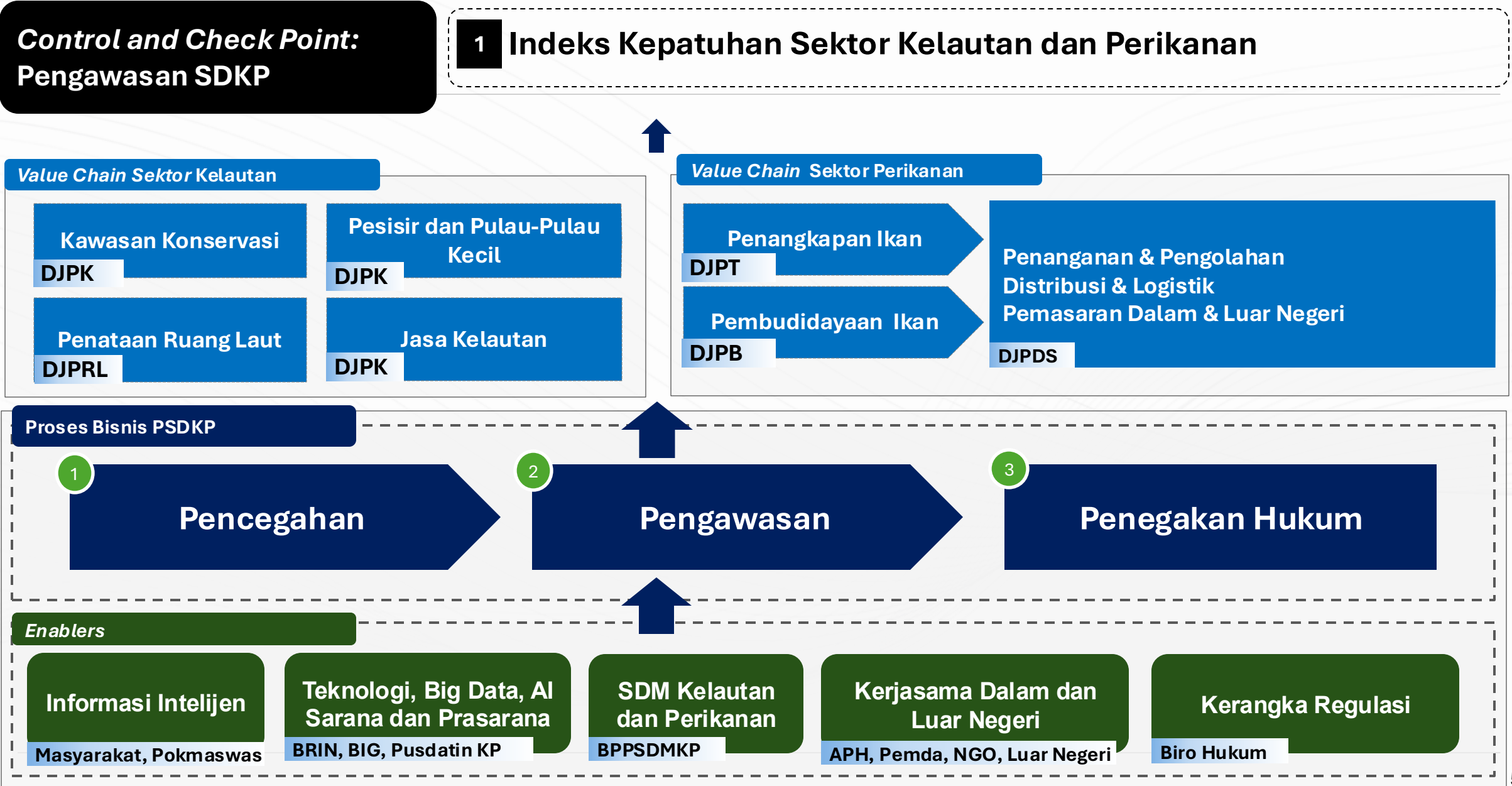
Ultimate Goals	Arah Kebijakan	Objectives	Control and Check Point	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
 Melindungi Laut dan Sumber Dayanya	Memperluas Kawasan Konservasi Laut	Memastikan Indonesia bebas dari pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan	Indikator baru	76,0	77,7	80,2	81,7	83,8
 Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah Lingkungan	Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan								
 Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan PPK Pembersihan Sampah Plastik di Laut								

Dukungan PSDKP 2025-2029

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KKP (Versi 2)

Ultimate Goals	Arah Kebijakan	Objectives	Control and Check Point	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
 Melindungi Laut dan Sumber Dayanya	Memperluas Kawasan Konservasi Laut	Memastikan Indonesia bebas dari pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	98%	98%	98,5%	99%	99,5%	100%
 Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah Lingkungan	Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan								
 Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan PPK Pembersihan Sampah Plastik di Laut								

Proses Bisnis Direktorat Jenderal PSDKP



Tantangan Proses Bisnis Pencegahan

Proses Bisnis	Objectives	Tantangan Utama		
Pencegahan	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1  Rendahnya literasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab	2  Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/pelaku usaha dalam pemanfaatan SDKP yang bertanggungjawab dan berkelanjutan	3  Rendahnya peran masyarakat dalam mengakses dan penyebarluasan informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		4  Tingginya resistensi masyarakat/pelaku usaha terhadap kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan	5  Belum optimalnya peran Pokmaswas dalam membantu pengawasan SDKP	



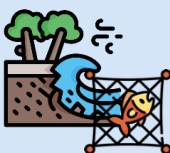
Strategi Pencegahan

Proses Bisnis	Objectives	Strategic Initiatives	Control Check Point	Satuan	Target		Anggaran (Rp Milyar)		
					2025	2029	APBN	PHLN	Other
Pencegahan	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab	Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat melalui edukasi, publikasi dan sosialisasi secara masif <i>Control point utama yang terdampak:</i> 1	Indeks kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab	Indeks	80	84	5,64	-	-
		Peningkatan peran masyarakat dalam mengakses dan penyebarluasan informasi pengawasan SDKP <i>Control point utama yang terdampak:</i> 1	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam akses media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai	1	3	4,1	-	-
		Penguatan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan <i>Control point utama yang terdampak:</i> 1	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang kebijakan pengelolaan SDKP	%	85	90	6,87	-	-
		Peningkatan kapasitas dan keterlibatan Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan <i>Control point utama yang terdampak:</i> 1	Nilai kualitas dan keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai	70	90	87,9	-	-

Tantangan Proses Bisnis Pengawasan (1/2)

Proses Bisnis	Objectives	Tantangan Utama				
Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan	1  Masih ditemukan aktifitas pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai tata kelola	2  Masih ditemukan penyalahgunaan dokumen perijinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan	3  Belum sepenuhnya kegiatan penangkapan ikan, budidaya, distribusi, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4  Masih ditemukan kapal ikan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Negara lain dan laut lepas	5  Masih adanya pelanggaran kegiatan penangkapan, pembudidayaan dan distribusi BBL
		6  Masih ditemukan kegiatan importasi hasil perikanan yang tidak memenuhi ketentuan	7  Masih adanya kegiatan pemanfaatan spesies, genetik dan ikan invasif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	8  Masih adanya kegiatan perikanan dan non perikanan (industri, tambang, dan pariwisata) yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan	9  Belum optimalnya pengawasan kelautan dan perikanan oleh pemerintah daerah, KEK dan KPBPB	

Tantangan Proses Bisnis Pengawasan (2/2)

Proses Bisnis	Objectives	Tantangan Utama							
Pengawasan	Memastikan Indonesia bebas <i>IUU Fishing</i> dan pelanggaran di laut	1		2		3		4	
		5		6		7			
		Tingkat kerawanan <i>IUU Fishing</i> yang masih tinggi berdasarkan indeks rawan <i>IUU Fishing</i>	Berkembangnya modus operandi aktivitas <i>IUU Fishing</i>	Masih terdapat potensi ketidakpastian hukum dalam penentuan batas maritim (delimitasi) Indonesia dengan negara tetangga	Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi & data intelligence dalam pengawasan maritim	Besarnya potensi kerusakan lingkungan sumber daya ikan akibat maraknya aktivitas penangkapan ikan yang merusak (<i>destructive fishing</i>), pencemaran laut dan pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Semakin tingginya komitmen global dalam pemberantasan <i>IUU Fishing</i> melalui skema kerjasama bilateral dan multilateral	Terbatasnya kapabilitas kelembagaan serta sarana dan prasarana pengawasan	

Strategi Pengawasan

Proses Bisnis	Objectives	Strategic Initiatives	Control Check Point	Satuan	Target		Anggaran (Rp Milyar)		
					2025	2029	APBN	PHLN	Other
Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan <i>Control point utama yang terdampak:</i>	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Indeks	82	86	175,7	-	-
		1	Indeks tindak lanjut pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	78	83	35,1	-	-
		Penguatan Operasi intelijen kelautan dan perikanan <i>Control point utama yang terdampak:</i>	Indeks kualitas intelijen kelautan dan perikanan	Indeks	78	80,75	80,1	-	-
	Memastikan Indonesia bebas IUU Fishing dan pelanggaran di laut	Meningkatkan ketangguhan Operasi dilaut melalui Maritime Intelligence System (MIS) <i>Control point utama yang terdampak:</i>	Indeks operasi armada pengawasan SDKP	Indeks	82	86	4.337,9	-	-
		1	Indeks keamanan berusaha sektor kelautan dan perikanan	Indeks	58,5	64	611,8	-	-
		Memastikan kecukupan dan kapabilitas sarana dan prasarana pengawasan <i>Control point utama yang terdampak:</i>	Indeks kesiapan sarana prasarana pengawasan SDKP	Indeks	81	85	276,5	5.828,9	-

1 Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan



Tantangan Proses Bisnis Penegakan Hukum

Proses Bisnis	Objectives	Tantangan Utama		
Penegakan Hukum	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	1  Semakin kompleksnyaodus operandi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	2  Penanganan perkara tindak pidana KP belum terintegrasi dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung (secara online/aplikasi)	3  Pemahaman yang berbeda antar penegak hukum bidang kelautan dan perikanan terkait regulasi kelautan dan perikanan
		4  Koordinasi lintas Lembaga yang belum optimal, termasuk perbedaan pemahaman antara penegak hukum terkait UU Cipta Kerja	5  Tingginya resistensi masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan	



Strategi Penegakan Hukum

Proses Bisnis	Objectives	Strategic Initiatives	Control Check Point	Satuan	Target		Anggaran (Rp Milyar)		
					2025	2029	APBN	PHLN	Other
Penegakan Hukum	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan kapasitas penegakan hukum dan kepastian hukum sektor kelautan dan perikanan Control point utama yang terdampak: 1	Indeks penegakan hukum kelautan dan perikanan	Indeks	82	86	71,1	-	-
			Indeks penyelesaian penyidikan TPKP	Indeks	94	98	54,5	-	-
			Indeks pengananan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	81	85	102,3	-	-

Tantangan Proses Bisnis Penegakan Hukum

Proses Bisnis	Objectives	Tantangan Utama		
Repressive (Penegakan Hukum)	Meningkatnya kepastian hukum sektor kelautan dan perikanan yang cepat, tepat dan akurat	1  Proses pengenaan sanksi yang berbelut-larut dan tidak segera memberikan kepastian hukum	2  Menumpuknya piutang denda administratif yang tidak terbayar	
	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	1  Semakin kompleksnyaodus operandi pelanggaran sektor KP	2  Penanganan perkara tindak pidana KP belum terintegrasi dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung (secara online/aplikasi)	3  Pemahaman yang berbeda antar penegak hukum bidang kelautan dan perikanan terkait regulasi kelautan dan perikanan
		4  Koordinasi lintas Lembaga yang belum optimal, termasuk perbedaan pemahaman antara penegak hukum terkait UU Cipta Kerja	5  Tingginya resistensi masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan	

Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025-2029

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Rincian Program	Sumber Pendanaan	Tahun					Total 2025-2029
		2025 (berjalan)	2026 (usulan)	2027 (indikatif)	2028 (indikatif)	2029 (indikatif)	
Proyek Strategis		Rp2.040,1 miliar	Rp1.751,9miliar	Rp1.953,1 miliar	Rp83,9 miliar	-	Rp5.828,9 miliar
Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	PHLN (Pemerintah Spanyol-BBVA/ICO)	Rp2.040,1 miliar	Rp1.751,9 miliar	Rp1.953,1 miliar	Rp83,9 miliar	-	Rp5.828,9 miliar
Modelling		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Pemerintah		Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp27,5 miliar
Pembinaan Pokmaswas (Aspirasi)	APBN	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp27,5 miliar
Mandatory		Rp445,6 miliar	Rp893,2 miliar	Rp966,3 miliar	Rp1.032,2 miliar	Rp1.125,4 miliar	Rp4.462,7 miliar
Operasi Kapal Pengawas	APBN	Rp310,5 miliar	Rp675 miliar	Rp720 miliar	Rp750 miliar	Rp789 miliar	Rp3.244,5 miliar
Operasi Pesawat Patroli	APBN	Rp 40 miliar	Rp42 miliar	Rp45 miliar	Rp52 miliar	Rp67 miliar	Rp246 miliar
Operasi Speedboat Pengawas	APBN	Rp9,8 miliar	Rp25 miliar	Rp25.5 miliar	Rp26.5 miliar	Rp34 miliar	Rp120,8 miliar
Operasional Pusdal PSDKP	APBN	Rp. 3,8 miliar	Rp4 miliar	Rp. 4,1 miliar	Rp. 4,2 miliar	Rp4,3 miliar	Rp20,4 miliar
Perawatan Armada PSDKP	APBN	Rp. 58,8 miliar	Rp. 100 miliar	Rp. 105 miliar	Rp. 110 miliar	Rp115 miliar	Rp488,8 miliar
Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha KP	APBN	Rp17,1 miliar	Rp28,5 miliar	Rp35 miliar	Rp42 miliar	Rp53,1 miliar	Rp175,8 miliar
Penanganan Kasus Sektor Kelautan dan Perikanan	APBN	Rp. 5,4 miliar	Rp18,7 miliar	Rp31,7 miliar	Rp47,5 miliar	Rp63 miliar	Rp166,3 miliar
Dukungan Tugas dan Fungsi	APBN	Rp96,0 miliar	Rp166,2 miliar	Rp202,8miliar	Rp242,9 miliar	Rp304,5 miliar	Rp. 1.012,4 miliar
Belanja Operasional	APBN	Rp280,0 miliar	Rp294,0 miliar	Rp308,7 miliar	Rp324,1 miliar	Rp340,4 miliar	Rp. 1.547,2 miliar
Total Anggaran		Rp2.867,2 miliar	Rp3.110,8milyar	Rp3.436,4 miliar	Rp1.688,6 miliar	Rp1.775,8 miliar	Rp12.878,6 miliar

Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025-2029

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

